

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Merauke

Andri Irawan¹⁾, Firda Yunitasari²⁾

¹⁾ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke, Indonesia

²⁾ SMA Negeri 1 Merauke, Indonesia

Email : andrirawan@unmus.ac.id

(Diterima Maret 2025; Disetujui Maret 2025; Dipublikasikan Maret 2025)

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan bangsa, sehingga perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui Kurikulum Merdeka diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayahnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan kurikulum merdeka pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan cara : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kabupaten Merauke masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, motivasi guru, dan efektivitas struktur birokrasi. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menyebabkan kesenjangan pemahaman antara guru dan siswa, sementara distribusi sumber daya yang tidak merata menghambat proses pembelajaran, terutama di daerah pelosok dengan fasilitas terbatas. Motivasi guru dalam menerapkan kurikulum ini bervariasi, di mana dukungan dan pelatihan yang memadai berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Selain itu, efektivitas struktur birokrasi yang belum seragam di setiap sekolah menyebabkan perbedaan dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih sistematis, pemerataan sumber daya, peningkatan pelatihan bagi guru, serta perbaikan struktur birokrasi agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih optimal di Kabupaten Merauke.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Merdeka Belajar

Abstract

Education is one of the main pillars in the nation's progress, so continuous efforts need to be made to improve the quality of education in Indonesia. Through the Independent Curriculum, schools are free to design learning that suits the needs and context of their region. This research aims to identify and analyze the implementation of the independent curriculum policy in high schools in Merauke Regency. This research uses a qualitative approach where data is obtained through observation and interviews, which are then analyzed by: Data Condensation, Data Display, and Conclusion Drawing/Verifications. The research results show that the implementation of the Merdeka Curriculum in Merauke Regency High Schools still faces various obstacles, especially in the aspects of communication, availability of resources, teacher motivation, and the effectiveness of the bureaucratic structure. Lack of socialization and training causes gaps in understanding between teachers and students, while unequal distribution of resources hinders the learning process, especially in remote areas with limited facilities. Teachers' motivations for implementing this curriculum vary, with adequate support and training playing an important role in successful implementation. In addition, the effectiveness of the bureaucratic structure is not yet uniform in each school, causing differences in program coordination and implementation. Therefore, a more systematic communication strategy is needed, equal distribution of resources, increased training for teachers, and improvements to the bureaucratic structure so that the implementation of the Merdeka Curriculum can run more optimally in Merauke Regency.

Keywords: Policy Implementation; Independent Curriculum; Freedom to Learn.

PENDAHULUAN

Pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan, fokusnya sekarang tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada pengembangan potensi manusia yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan, baik di daerah perkotaan maupun terpencil adalah topik yang menarik dan sering dibicarakan. Bagaimana melalui Pendidikan mampu untuk memerdekakan diri untuk mengatasi keterbelakangan, kebodohan, penindasan, dan hambatan bagi pertumbuhan manusia. Untuk mendapatkan pencapaian ini maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan program kebijakan kemandirian belajar melalui Peraturan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, yang mengamandemen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan bangsa. Kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan memimpin bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meluncurkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang lebih kreatif, inovatif, dan berkarakter.

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayahnya. Sekolah juga diberikan kewenangan untuk memilih dan mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam proses pembelajaran. Guru dapat lebih leluasa dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan menarik, serta peserta didik dapat lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menjadi acuan utama bagi sekolah-sekolah di kabupaten merauke dalam rangka melakukan transformasi pembelajaran. Konsep merdeka belajar merupakan salah satu pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa (*student-centered learning*) yang sebenarnya.

Pembelajaran dengan konsep belajar bebas ini dianggap memberikan tantangan dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kemampuan, kepribadian, dan kebutuhan mereka. Ini juga membantu mereka menjadi mandiri dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui persyaratan kemampuan, masalah nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tujuan dan pencapaian mereka. Program belajar merdeka yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* peserta didik. Melalui merdeka belajar guru memiliki kebebasan untuk memilih pembelajaran yang sesuai dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakter siswa mereka. Seperti yang disebutkan (Vhalery

et al., 2022) bahwa kebebasan kurikulum merdeka memiliki arti untuk mendorong siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan menumbuhkan karakter.

Pada Kebijakan Kurikulum Merdeka ini paradigma pembelajaran juga berubah. Ini berarti siswa harus dibekali dengan kemampuan dan keahlian yang relevan dengan dunia modern. Siswa harus didorong untuk menjadi inovatif, kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi, dan memahami teknologi di era modern (Jayadi et al., 2020). Oleh karena itu, analisis kurikulum sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum harus dirancang untuk mencerminkan perubahan paradigma pembelajaran abad ke-21 dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern.

Dari rujukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aroka et al., (2023) bahwa penerapan merdeka belajar memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dan pendidik dalam berbagai cara, seperti menemukan ide-ide baru selama pembelajaran dan membuat karya inovasi. Akan tetapi, beberapa permasalahan juga masih ditemukan dalam implementasi kurikulum merdeka, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) yang menunjukkan bahwa guru masih menghadapi masalah dalam merencanakan, menerapkan, dan menilai pembelajaran Kurikulum Merdeka.

Permasalahan terkait dengan kesiapan guru dalam menghadapi Kurikulum Merdeka juga terjadi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Merauke. Salah satunya adalah guru tidak menerima pelatihan yang memadai tentang kurikulum merdeka. Mereka hanya mendapatkan pemahaman tentang kurikulum dari guru yang memiliki pemahaman yang lebih luas tentang kurikulum merdeka, atau hanya belajar dari modul yang diberikan lewat aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM). Guru-guru yang lebih memahami juga kadang-kadang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang ide-ide di balik kurikulum merdeka tersebut.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi PMM juga belum digunakan secara maksimal oleh para guru di Kabupaten Merauke. Alasan yang dikemukakan adalah karena kesibukan mengajar yang mengakibatkan mereka tidak aktif dalam menggunakan aplikasi PMM tersebut. Kurangnya kompetensi guru dalam menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan gadget dan aplikasi turut menjadi permasalahan yang menjadikan penerapan kurikulum merdeka terhambat. Pengawas sekolah yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka juga kurang memahami hakekat dan substansi kurikulum merdeka. Mereka juga tidak tahu bagaimana menerapkan pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka di sekolah. Pengawas juga tidak memberikan arahan atau bimbingan tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui seberapa efektif hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dalam Kepmendikbudristek No.56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka, salah satunya dapat dilakukan dengan penelitian kebijakan. Terdapat beberapa perspektif yang berbeda untuk melakukan analisis implementasi kebijakan, salah satunya adalah pendekatan masalah implementasi yang diusulkan oleh G.C. Edwards III (1978). Pertanyaan utama yang diajukan dalam analisis ini adalah faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan faktor apa yang menghambat keberhasilan

*Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Merauke*

implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, dirumuskan empat komponen yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi. Empat komponen tersebut menjadi kriteria penting untuk menjalankan kebijakan.

Keempat faktor tersebut memiliki tolak ukur yang lebih spesifik. Komunikasi program hanya mungkin dijalankan dengan benar jika pelaksana membuatnya jelas. Ini berkaitan dengan cara informasi diintegrasikan, dijernihkan, dan dikomunikasikan dengan konsisten. Sumber daya terdiri dari empat komponen: tenaga kerja yang memadai secara kuantitas dan kualitas, otoritas pengambilan keputusan, tenaga kerja yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sikap memiliki indikator komitmen pelaksana program, sedangkan Organisasi birokrasi didasarkan pada standar operasional prosedur, yang juga bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan mengarahkan alur kerja. Keempat indikator tersebut menjadi alat ukur dalam evaluasi kritis terhadap Implementasi Kebijakan merdeka belajar pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebab dengan pendekatan ini dapat diperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi Kurikulum merdeka belajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Merauke serta melihat factor-faktor yang memengaruhi dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar. Model kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan ini adalah dengan menggunakan model Edward III (Widodo : 2011) dimana berhasil tidaknya implementasi ditentukan oleh beberapa factor yaitu; a) Komunikasi; b) Sumber daya; c) Sikap; dan d) Struktur Organisasi dan Birokrasi.

Indikator komunikasi berisi tentang Kejelasan informasi program, Transmisi dalam akses informasi, serta konsistensi dalam memahami isi dan tujuan program. Indikator Sumber daya melihat tentang Fasilitas sarana pembelajaran, Fasilitas kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, Kewenangan alokasi dana program. Indikator sumber daya berbicara mengenai jumlah dan kualitas guru, Informasi sumber daya mengenai pedoman dan aturan. Indikator disposisi berisi tentang Motivasi Guru dalam mengikuti program kurikulum merdeka, Dampak positif pada proses pembelajaran selama mengikuti program kurikulum merdeka, Dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan program kurikulum merdeka. Sedangkan untuk Struktur Birokrasi yaitu fragmentasi struktur organisasi dalam mendukung program kurikulum merdeka, Kebijakan sekolah dalam mendukung penerapan Program Kurikulum Merdeka (SOP), serta koordinasi antara tingkatan kepemimpinan jenjang sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para koordinator) dalam mengelola Program Kurikulum merdeka.

Penelitian diawali dengan melakukan observasi pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Merauke, kemudian melakukan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengumpulkan data penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa guru dan siswa sebagai informan penunjang. Data penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan model (Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny, 2014) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verifications*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Merauke

Fokus pembelajaran abad kedua puluh satu adalah metode dan pendekatan pengajaran yang lebih sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan modern. Pergeseran pesat yang terjadi dalam bidang teknologi, ekonomi, dan masyarakat telah mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, dan bekerja. Oleh karena itu, pendidikan harus berubah agar siswa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Proses penerapan kurikulum belajar merdeka di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Merauke akan dibahas dalam penelitian ini. Perubahan pesat dalam teknologi dan globalisasi telah mengubah tuntutan dunia pendidikan, yang menuntut siswa untuk lebih kreatif saat belajar. Pendekatan yang lebih inklusif, kreatif, dan berfokus pada kemampuan praktis telah menggantikan pendekatan tradisional yang hanya menekankan pengetahuan teoritis dan menghafal.

Implementasi merupakan salah satu langkah penting dari proses kebijakan public, seperti dikatakan oleh Dunn (2002) bahwa kebijakan publik itu terdiri dari serangkaian langkah-langkah yaitu : agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Untuk melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah implementasi yang diusulkan oleh G.C. Edwards III (1978). Pertanyaan utama yang diajukan dalam analisis ini adalah faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, dirumuskan empat komponen yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi. Empat komponen tersebut menjadi kriteria penting untuk menjalankan kebijakan.

1. Komunikasi

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III dalam Nugroho (2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi yang dimaksud oleh Edward III adalah berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan publik dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama pemangku kepentingan. Menurut Edward III, pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan publik bergantung pada komunikasi yang efektif antara pelaksana dan program kebijakan tersebut serta para pemangku kepentingan atau

*Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Merauke*

masyarakat umum. Dengan komunikasi, tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara efektif, yang menghindari distorsi atau penolakan kebijakan. Menurut model ini ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi, yaitu cara informasi disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten penyampaian informasi itu.

Transmisi dalam Penyebaran Informasi

Persyaratan utama untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah transmisi, yang berarti para pelaksana kebijakan harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebelum perintah dan keputusan kebijakan diikuti, kebijakan tersebut harus ditransmisikan atau diteruskan kepada para pelaksana. Oleh karena itu, sebelum pejabat dapat menerapkan suatu keputusan kebijakan, mereka harus memastikan bahwa keputusan telah dibuat dan perintah untuk menerapkannya telah diberikan.

Transmisi dalam penyebaran informasi antara guru dan siswa belum berjalan optimal, karena masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa mengadaptasi pendekatan yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami manfaat dari kurikulum tersebut dan tetap bergantung pada pola belajar lama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Merdeka Belajar telah diterapkan, tantangan dalam aspek transmisi masih terjadi, terutama dalam penyebaran informasi antara guru dan siswa. Banyak guru yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa mengadaptasi pendekatan yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka, sehingga siswa kurang memahami manfaat dari kebijakan ini dan tetap bergantung pada pola belajar lama. Di Kabupaten Merauke, kondisi ini dapat terlihat dari masih terbatasnya pemanfaatan modul ajar berbasis proyek serta kurangnya pelatihan intensif bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pendampingan kepada guru serta memperkuat sosialisasi kepada siswa agar mereka dapat lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat Merdeka Belajar.

Kejelasan informasi

Aspek kedua yang disoroti oleh Edward III dalam indikator komunikasi kebijakan adalah kejelasan (clarity) komunikasi. Dikatakan bahwa jika suatu kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal.

Kejelasan informasi program masih menjadi kendala utama, di mana banyak guru yang

mengaku belum sepenuhnya memahami konsep dan teknis pelaksanaannya akibat kurangnya sosialisasi yang terstruktur. Beberapa sekolah juga mengalami kesulitan dalam transmisi akses informasi, terutama terkait keterbatasan bahan ajar dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Keterbatasan infrastruktur digital serta kurangnya dukungan teknis menyebabkan akses terhadap platform pembelajaran menjadi tidak merata, terutama di daerah dengan jaringan internet yang masih lemah.

Konsistensi

Aspek ketiga yang dianggap penting oleh Edward III dalam efektivitas komunikasi kebijakan publik adalah konsistensi. Menurut Edward III dalam Winarno (2016), agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, instruksi pelaksanaannya harus tetap konsisten. Meskipun perintah yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sudah jelas, jika terdapat pertentangan dalam instruksi tersebut, maka hal itu justru akan menyulitkan mereka dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan para pelaksana memiliki keleluasaan yang berlebihan dalam menafsirkan dan menerapkannya. Jika hal ini terjadi, efektivitas kebijakan bisa terganggu, karena tindakan yang terlalu fleksibel berisiko tidak sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada SMA Negeri di Kabupaten Merauke untuk aspek konsistensi dalam memahami isi dan tujuan program juga belum tercapai secara maksimal. Perbedaan tingkat pemahaman antara sekolah yang memiliki akses informasi lebih baik dengan yang terbatas menyebabkan kesenjangan dalam penerapan kurikulum ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan mendalam, keterbatasan sumber daya, serta inkonsistensi dalam pendampingan dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Merauke dapat berjalan lebih efektif dan merata.

2. Sumber Daya

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Merauke sangat bergantung pada ketersediaan dan distribusi sumber daya yang mencakup fasilitas pembelajaran, tenaga pendidik, serta dukungan kebijakan dan pendanaan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala yang perlu diatasi agar pelaksanaan kurikulum ini berjalan optimal.

Fasilitas Sarana Pembelajaran

Fasilitas sarana pembelajaran di SMA Negeri di Kabupaten Merauke masih belum merata, terutama di daerah pinggiran kota. Beberapa sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses terhadap infrastruktur pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah yang berada di distrik pinggiran. Misalnya, SMA Negeri 2 Merauke telah memiliki akses internet dengan kecepatan 50 Mbps, yang memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis digital. Namun, sekolah-sekolah di daerah pinggir masih mengalami keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, sehingga sulit

menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi yang menjadi inti dari Kurikulum Merdeka.

Fasilitas Kelas, Laboratorium, Perpustakaan, dan Fasilitas Olahraga

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kondisi ruang kelas di beberapa SMA di Kabupaten Merauke cukup beragam. SMA Negeri 1 Merauke, misalnya, memiliki 34 ruang kelas yang masih dalam kondisi layak. Sekolah ini juga memiliki laboratorium biologi, fisika, dan komputer, serta dua ruang perpustakaan yang mendukung kegiatan literasi siswa. Namun, banyak sekolah lainnya yang masih mengalami keterbatasan dalam fasilitas laboratorium sains dan komputer, sehingga menghambat pembelajaran berbasis eksperimen dan eksplorasi teknologi. Selain itu, fasilitas olahraga juga belum tersedia secara optimal di semua sekolah. Beberapa sekolah hanya memiliki lapangan sederhana yang belum memenuhi standar untuk mendukung kegiatan pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler olahraga secara maksimal. Kekurangan ini berpotensi membatasi perkembangan keterampilan fisik dan kesehatan siswa yang juga menjadi bagian penting dalam Kurikulum Merdeka.

Kewenangan Alokasi Dana Program

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, alokasi dana menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas implementasinya. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mendistribusikan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum ini. Namun, di lapangan, terdapat kendala dalam transparansi dan pemerataan distribusi dana ke sekolah-sekolah. Beberapa sekolah mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk pembelian modul ajar dan pengadaan pelatihan guru, sementara sekolah lain masih mengalami keterbatasan dalam mengakses dana tersebut. Selain itu, dana yang tersedia sering kali belum mencukupi untuk meningkatkan fasilitas yang masih minim, seperti laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur teknologi pendukung pembelajaran berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan dana yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan sekolah agar setiap SMA di Kabupaten Merauke dapat menjalankan Kurikulum Merdeka dengan lebih optimal.

Jumlah dan Kualitas Guru

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Merauke adalah jumlah dan kualitas tenaga pendidik. Dari segi kualitas, banyak guru yang masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut dalam memahami dan menerapkan prinsip Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional dan mengalami kesulitan dalam mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Untuk mengatasi hal ini, beberapa sekolah telah mengadakan workshop dan pelatihan intensif bagi guru, seperti yang dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Merauke. Namun,

belum semua sekolah mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga masih terjadi kesenjangan dalam pemahaman dan kesiapan tenaga pendidik.

Pedoman dan Aturan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Merauke adalah ketersediaan pedoman dan aturan yang jelas. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai modul dan panduan melalui platform digital, masih banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami kebijakan tersebut secara utuh.

Di beberapa sekolah, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Akibatnya, ada sekolah yang sudah cukup maju dalam mengadopsi kurikulum ini, sementara yang lain masih ragu atau bahkan belum menerapkannya secara penuh. Diperlukan peningkatan pendampingan dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar setiap sekolah memiliki pemahaman yang seragam dan dapat menjalankan kebijakan ini dengan efektif.

Berdasarkan realita di lapangan, implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kabupaten Merauke masih menghadapi berbagai tantangan terkait sumber daya. Ketersediaan fasilitas pendidikan, alokasi dana, jumlah dan kualitas guru, serta akses terhadap pedoman dan aturan masih belum merata di seluruh sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih sistematis dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan pelatihan bagi guru, serta penguatan infrastruktur pendidikan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara maksimal di seluruh SMA di Kabupaten Merauke.

3. Disposisi

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah menengah atas (SMA) Kabupaten Merauke tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga pada faktor disposisi, yakni bagaimana sikap dan motivasi guru, dampak yang dirasakan dalam proses pembelajaran, serta dukungan dari pihak sekolah dalam menjalankan kurikulum ini. Faktor-faktor ini sangat menentukan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan di tingkat sekolah.

Motivasi Guru dalam Mengikuti Program Kurikulum Merdeka

Di Kabupaten Merauke, motivasi guru dalam mengikuti program Kurikulum Merdeka bervariasi tergantung pada pengalaman dan kesiapan individu. Berdasarkan observasi di lapangan, sebagian besar guru memiliki semangat tinggi untuk memahami dan menerapkan kurikulum ini karena mereka melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa.

Namun, di sisi lain, ada juga guru yang merasa terbebani dengan perubahan yang cukup signifikan, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan metode pengajaran konvensional. Kurangnya pelatihan yang mendalam dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang menurunkan motivasi guru. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka merasa kebingungan dalam menyusun modul ajar dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek karena belum mendapatkan bimbingan yang cukup dari dinas pendidikan maupun sekolah.

*Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Merauke*

Selain itu, perbedaan akses terhadap sumber daya pendidikan, seperti bahan ajar dan teknologi pendukung, juga mempengaruhi tingkat motivasi guru. Guru yang mengajar di daerah perkotaan cenderung lebih termotivasi karena memiliki akses yang lebih baik terhadap internet dan fasilitas sekolah dibandingkan guru di daerah pedalaman yang sering mengalami keterbatasan sumber daya.

Dampak Positif pada Proses Pembelajaran Guru Selama Mengikuti Program Kurikulum Merdeka

Meskipun masih ada tantangan, implementasi Kurikulum Merdeka telah memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Merauke. Salah satu perubahan signifikan yang dirasakan guru adalah kebebasan dalam menyusun materi ajar yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, guru mulai menerapkan metode yang lebih aktif dan interaktif, yang membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Beberapa guru yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka mengakui bahwa metode ini membantu mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Misalnya, di SMA Negeri 1 dan 3 Merauke, guru melaporkan adanya peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelas setelah mereka mengubah metode pengajaran dari ceramah menjadi diskusi berbasis proyek.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga membantu guru dalam mengembangkan keterampilan profesional mereka, terutama dalam aspek pengelolaan kelas dan penilaian berbasis kompetensi. Guru yang sebelumnya terbiasa dengan sistem pembelajaran berbasis nilai kini lebih memahami pentingnya asesmen formatif yang menilai pemahaman siswa secara lebih mendalam.

Namun, ada juga kendala yang dihadapi, terutama dalam aspek adaptasi. Tidak semua guru langsung mampu menyesuaikan diri dengan pendekatan baru ini. Beberapa guru masih kesulitan dalam mengatur waktu untuk merancang proyek pembelajaran yang efektif dan menyesuaikannya dengan kondisi siswa di daerah masing-masing.

Dukungan yang Diberikan oleh Pihak Sekolah dalam Pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka

Peran sekolah dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka sangat krusial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tenaga pendidik, dukungan dari pihak sekolah masih beragam tergantung pada kesiapan dan kebijakan masing-masing institusi.

Di beberapa sekolah seperti SMA Negeri 1, 2, & 3 Merauke, pihak sekolah aktif memberikan dukungan berupa pelatihan internal bagi guru, penyediaan bahan ajar, dan bimbingan teknis dalam penyusunan modul ajar. Selain itu, sekolah juga menyediakan forum diskusi antar-guru untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan kurikulum ini. Langkah ini sangat membantu guru dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi selama proses implementasi.

Namun, di beberapa sekolah lain, terutama yang berada di wilayah pedalaman, dukungan dari pihak sekolah masih sangat terbatas. Beberapa guru melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan cukup bimbingan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet membuat implementasi Kurikulum Merdeka menjadi lebih sulit.

Selain aspek teknis, dukungan psikologis juga penting bagi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum ini. Di beberapa sekolah, kepala sekolah aktif memberikan motivasi dan dorongan kepada guru agar tetap semangat dalam menjalankan perubahan ini. Namun, ada juga sekolah yang kurang memberikan perhatian terhadap aspek kesejahteraan guru, sehingga beberapa guru merasa terbebani tanpa adanya bantuan yang memadai.

Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Merauke sangat dipengaruhi oleh indikator disposisi, yakni motivasi guru, dampak positif dalam pembelajaran, serta dukungan sekolah. Meskipun ada tantangan dalam hal adaptasi, banyak guru yang tetap bersemangat untuk menerapkan pendekatan baru ini karena melihat manfaatnya dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran.

Dukungan dari pihak sekolah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan ini. Sekolah yang aktif memberikan pelatihan, fasilitas yang memadai, serta pendampingan bagi guru cenderung lebih berhasil dalam menjalankan Kurikulum Merdeka dibandingkan sekolah yang masih minim dukungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih sistematis dalam memberikan pelatihan, menyediakan sumber daya yang cukup, serta memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik mendapatkan pendampingan yang memadai agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara optimal di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Merauke.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Merauke tidak hanya bergantung pada kesiapan guru dan siswa, tetapi juga pada efektivitas struktur birokrasi dalam mendukung jalannya kebijakan. Struktur birokrasi yang mencakup fragmentasi organisasi, kebijakan sekolah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antar-tingkatan kepemimpinan sekolah menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penerapan kurikulum ini.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, implementasi Kurikulum Merdeka di beberapa SMA Negeri di Kabupaten Merauke masih menghadapi tantangan terkait pembagian tugas dalam struktur organisasi sekolah, belum adanya kebijakan yang seragam dalam bentuk SOP, serta lemahnya koordinasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para koordinator dalam mengelola program ini. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas secara rinci bagaimana struktur birokrasi berperan dalam mendukung atau menghambat implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah tersebut.

Fragmentasi Struktur Organisasi dalam Mendukung Program Kurikulum Merdeka

Struktur organisasi sekolah memegang peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara efektif. Dalam praktiknya, fragmentasi organisasi di SMA Negeri di Kabupaten Merauke masih menunjukkan perbedaan dari satu sekolah ke sekolah lainnya.

Di beberapa sekolah yang sudah lebih siap, seperti SMA Negeri 1, 2, & 3 Merauke, pembagian tugas dalam struktur organisasi sudah cukup jelas. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah kebijakan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan program Kurikulum Merdeka, sementara koordinator guru penggerak menjadi fasilitator utama bagi para guru dalam menyusun modul ajar dan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, sekolah ini telah membentuk tim khusus yang menangani transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, sehingga para guru mendapatkan arahan yang lebih sistematis.

Namun, di sekolah lain, seperti SMA Negeri 4 Merauke, struktur organisasi dalam mendukung Kurikulum Merdeka masih belum efektif. Beberapa guru melaporkan bahwa tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga mereka harus mencari informasi dan memahami sendiri bagaimana menerapkan kurikulum ini. Minimnya peran wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan tidak adanya tim khusus menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan tidak merata di setiap kelas.

Selain itu, masih terdapat guru yang belum sepenuhnya memahami bagaimana peran mereka dalam struktur organisasi yang baru, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek yang menjadi salah satu ciri utama Kurikulum Merdeka. Akibatnya, sebagian besar guru tetap menerapkan metode pengajaran tradisional karena belum mendapatkan arahan yang jelas dari pihak sekolah.

Kebijakan Sekolah dalam Mendukung Penerapan Program Kurikulum Merdeka (SOP)

Kebijakan sekolah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi seluruh tenaga pendidik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. SOP yang jelas akan membantu sekolah dalam menjalankan program secara konsisten dan mengurangi kebingungan di kalangan guru. Di SMA Negeri 2 Merauke, kebijakan sekolah sudah cukup mendukung penerapan Kurikulum Merdeka. Pihak sekolah telah menyusun SOP yang mencakup: (a) Panduan dalam menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan berbasis pada prinsip pembelajaran diferensiasi; (b) Aturan dalam pelaksanaan asesmen formatif, sehingga guru dapat menilai perkembangan siswa secara lebih holistic; (c) Program pelatihan dan pendampingan bagi guru, baik dalam bentuk lokakarya internal maupun diskusi kelompok dengan guru penggerak.

Namun, tidak semua sekolah memiliki SOP yang sudah tersusun dengan baik. Di beberapa sekolah lain, SOP masih bersifat umum dan belum mengatur secara detail bagaimana Kurikulum

Merdeka harus diterapkan. Sebagian besar guru mengaku belum menerima dokumen kebijakan sekolah yang mengatur tentang strategi implementasi kurikulum ini. Akibatnya, ada perbedaan dalam cara penerapan antara satu guru dengan guru lainnya, yang mengarah pada ketidakkonsistenan dalam proses pembelajaran.

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai SOP juga menjadi kendala. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka hanya mendapatkan informasi secara lisan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah tanpa adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan acuan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi dan perbedaan pemahaman antara satu guru dengan guru lainnya.

Koordinasi antara Tingkatan Kepemimpinan Sekolah dalam Mengelola Program Kurikulum Merdeka

Koordinasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan koordinator kurikulum sangat menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi guru dalam menerapkan kurikulum ini. Di SMA Negeri 1 Merauke, kepala sekolah secara rutin mengadakan pertemuan mingguan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan para koordinator guru. Hasil dari pertemuan ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh tenaga pendidik agar mereka memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kurikulum. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dalam bentuk evaluasi berkala untuk melihat kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek.

Namun, di beberapa sekolah lainnya, koordinasi antar-tingkatan kepemimpinan masih lemah. Beberapa guru melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan arahan yang cukup dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah mengenai strategi penerapan Kurikulum Merdeka. Akibatnya, banyak guru yang merasa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan yang memadai dari pihak manajemen sekolah.

Selain itu, di beberapa sekolah, koordinasi antara kepala sekolah dan koordinator kurikulum belum berjalan dengan baik. Beberapa koordinator mengaku bahwa mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait implementasi kurikulum, sehingga mereka tidak dapat memberikan bimbingan yang maksimal kepada guru. Kurangnya koordinasi ini juga menyebabkan keterlambatan dalam distribusi informasi mengenai Kurikulum Merdeka. Beberapa guru menyatakan bahwa mereka baru mendapatkan informasi terbaru mengenai kurikulum setelah program sudah berjalan, sehingga mereka harus melakukan penyesuaian secara mendadak tanpa persiapan yang matang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah menengah atas (SMA) Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam implementasi kebijakan ini, dimana dapat dilihat dari empat indikator yaitu terkait indikator Komunikasi masih menghadapi kendala dalam hal kejelasan informasi, transmisi akses informasi, serta konsistensi pemahaman antara guru dan siswa. Kurangnya sosialisasi dan

*Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Merauke*

pelatihan menyebabkan banyak guru yang masih kesulitan memahami konsep dan teknis pelaksanaannya. Perbedaan akses informasi juga menciptakan kesenjangan antara sekolah yang memiliki fasilitas lebih baik dengan yang masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan strategi komunikasi yang sistematis antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan.

Kemudian untuk indikator kedua yaitu Ketersediaan dan distribusi sumber daya pendidikan di Kabupaten Merauke masih belum merata. Beberapa sekolah memiliki fasilitas pembelajaran yang baik, seperti laboratorium dan akses internet, sementara sekolah di daerah pelosok masih mengalami keterbatasan infrastruktur. Alokasi dana juga menjadi tantangan, di mana distribusi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan dalam penyediaan sarana pembelajaran. Selain itu, jumlah dan kualitas guru masih menjadi kendala, dengan banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan memadai dalam mengadaptasi metode pembelajaran Kurikulum Merdeka.

Sikap dan motivasi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka sangat bervariasi. Sebagian besar guru yang memiliki akses pelatihan dan dukungan yang baik dari sekolah menunjukkan semangat yang tinggi dalam menerapkan kurikulum ini. Namun, masih banyak guru yang merasa terbebani karena kurangnya bimbingan teknis dan sumber daya. Dukungan dari pihak sekolah, seperti pelatihan internal dan penyediaan bahan ajar, sangat membantu guru dalam mengatasi kendala implementasi. Sekolah yang aktif dalam mendukung guru melalui pelatihan dan supervisi menunjukkan keberhasilan yang lebih tinggi dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Sedangkan efektivitas struktur birokrasi dalam mendukung Kurikulum Merdeka masih beragam di setiap sekolah. Sekolah yang memiliki pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan koordinator kurikulum mampu menjalankan program ini dengan lebih efektif. Sebaliknya, di sekolah yang struktur organisasinya masih lemah, terjadi kebingungan dalam pelaksanaan program, kurangnya arahan bagi guru, serta minimnya evaluasi berkala. Selain itu, belum semua sekolah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci, sehingga menyebabkan perbedaan dalam cara penerapan kurikulum antar-guru.

DAFTAR PUSTAKA:

- Aroka, Robi., Desman., Kustati Martin., & Nana Sepriyanti (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Negeri 9 Padang. Vol .3 No.2. Hal. 9609-9619.
- Dunn W. 2002, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta : UGM Press.
- Jayadi, A., Putri, D. H., & Johan, H. (2020). Identifikasi Pembekalan Keterampilan Abad 21 Pada Aspek Keterampilan Pemecahan Masalah Siswa SMA Kota Bengkulu Dalam Mata Pelajaran Fisika. Jurnal Kumparan Fisika. Vol. 3 No.1, Hal. 25–32.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka.

- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny, S. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook, Third Edition (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications
- Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. Jakarta: PT. Gramedia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Peraturan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Putri, V.F.B., Asbari, M., Khanza, S.A.K. (2023) Revolusi Pendidikan: Kurikulum Merdeka Solusi Problematika Belajar. Journal Of Information Systems And Management, Vol. 02 No. 06.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. Research And Development Journal Of Education, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/Rdje.V8i1.11718>
- Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.